

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TNI ANGKATAN LAUT PADA SUBDIS
AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DINAS KEUANGAN ANGKATAN LAUT

Disusun Oleh:

N A M A : ARIE DWIDESTA
NPM : 1963002006
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister
Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP).



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2022

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Arie Dwidesta
NPM : 1963002006
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Penyusunan Laporan Keuangan TNI Angkatan Laut Pada Subdis Akuntansi Pelaporan Keuangan Dinas Keuangan Angkatan Laut

Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Preparation of the Navy's Financial Statements in the Sub-Division of Accounting for Financial Reporting of the Navy's Financial Service

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Edy Sutrisno, M.Si

Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Arie Dwidesta
NPM : 1963002006
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Analisis Penyusunan Laporan Keuangan TNI Angkatan Laut Pada Subdis Akuntansi Pelaporan Keuangan Dinas Keuangan Angkatan Laut

Telah mempertahankan tesis dihadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. R Luki Karunia :
Sekretaris : Dr. Neneng Sri Rahayu, M. :
Anggota : Dr. Asropi, M.Si. :
Pembimbing 1 : Dr. Edy Sutrisno, M.Si :
Pembimbing 2 : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA :

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertadatangan di bawah ini:

Nama : Arie Dwidesta
NPM : 1963002006
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Penyusunan Laporan Keuangan TNI Angkatan Laut Pada Subdis Akuntansi Pelaporan Keuangan Dinas Keuangan Angkatan Laut” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dirujuk maupun yang tidak dirujuk telah peneliti nyatakan dengan benar.

Jakarta, Desember 2022
Yang membuat Pernyataan

Arie Dwidesta

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum wa rohmatulloohi wa barokaatu.

Segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad sholallaahu alaihi wassalam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya termasuk kita, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara pada Politeknik STIA LAN Jakarta. Penulis sangat menyadari betapa besar perhatian, bimbingan dan partisipasi dari berbagai pihak, mulai dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan tesis. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin selaku Direktur Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
2. Bapak Dr. Asropi, S.Ip., M.Si, selaku Ketua Prodi APN Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si dan ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan masukan dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Segenap dosen Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan kuliah dan pelajaran yang bermanfaat.
5. Para staf Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah banyak membantu dan memfasilitasi kebutuhan peneliti.
6. Para Narasumber/Key Informan, Letkol Wulan Furwanto, S.E., M.M, Letkol Agus Herjito, S.E., M.M. Mayor Pandu Briantisno, S.AP., M.Si., Kapten Joko Nur Andi Atmoko, S.T., Kapten Arifda Yenli, bapak Agus Santoso, S.E., Serka David Sapriyadi yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga yang penulis butuhkan melalui proses wawancara.
7. Pimpinan dan rekan-rekan di Diskual dan Skomlekal khususnya rekan di Subdis APK Diskual yang telah mengizinkan dan memudahkan peneliti dalam proses penelitian serta memberikan bantuan dalam penyediaan data dan informasi yang penulis perlukan.
9. Ibunda, kakak dan adik memberikan doa agar penulis dapat menyelesaikan semua tugas dan tanggungjawabnya yang telah dibebankan

10. Anak-anakku tercinta dr, Widya Steffi Andyani dan Anggie Maura Safitri, S.E.Ak. yang slalu mensupport dan doanya kepada penulis.
11. Teman-teman kuliah seangkatan program Magister tahun 2019 konsentrasi MKN dan MKP.

Semoga Allah subhaanahu wa ta'aalaa senantiasa memberikan keberkahan kepada semuanya.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada tesis ini. Kritik dan saran membangun akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat menambah wawasan pengetahuan serta mendapat ridho Allaah subhaanahu wa ta'aalaa. Aamiin.

Wassalamu alaikum wa rohmatulloohi wa barokaatu.

Jakarta, Desember 2022

POLITEI
STIA LAIN
JAKARTA

ABSTRAK

ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TNI ANGKATAN LAUT PADA SUBDIS AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DINAS KEUANGAN ANGKATAN LAUT

Arie Dwidesta, Edy Sutrisno, Nurliah Nurdin
ariwidesta@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan unit organisasi TNI Angkatan Laut.

Metodologi penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen

Hasil penelitian yang penulis masukan dalam *Theory Of Constraint* menunjukkan bahwa kurangnya memahami aturan yang berlaku dan kurangnya menguasai aplikasi baik operator Saiba maupun operator Simak BMN dan kurang optimalnya kursus dan sosialisasi yang dilaksanakan untuk menunjang proses penyusunan Laporan Keuangan Unit Organisasi TNI Angkatan Laut

Saran dari penulis dalam Penelitian ini yang diterapkan dalam *Theory of Constraint* (TOC) dikembangkan (Hansen & Mowen, 2007) difokuskan pada lima langkah yaitu: 1. Mengidentifikasi kendala 2. Mengeksplor kendala 3. Rancang *System* yang Efisien 4. *Elevasi Constraint* 5. Ulang Proses. konsep teori ini dapat diterapkan untuk memperbaiki kinerja instansi yang menghadapi sumberdaya terbatas. TOC yang Dengan menerapkan konsep kendala ini diharapkan hambatan/kendala yang mempengaruhi jalannya proses penyusunan Laporan Keuangan pada U.O. TNI Angkatan Laut dapat teratasi dan mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan dan mengurangi masalah yang terjadi tiap tahunnya. Setelah mengimplementasikan konsep kendala ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik lagi dengan mengoptimalkan sumberdaya baik itu pada sumberdaya manusia ataupun sarana dan prasarana untuk mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan di unit organisasi TNI Angkatan Laut.

Kata kunci: *Theory of Constraint*, Laporan Keuangan, Simak BMN.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE PREPARATION OF THE NAVY'S FINANCIAL STATEMENTS IN SUBDIVISION AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DINAS KEUANGAN ANGKATAN LAUT

Arie Dwidesta, Edy Sutrisno, Nurliah Nurdin
ariwidesta@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to determine the factors that can influence the process of preparing the financial statements of the Indonesian Navy's organizational units.

Qualitative research methodology, with data collection techniques carried out through interviews, observation and document review

The results of the research that the author inputs into Theory of Constraint show that there is a lack of understanding of the applicable rules and a lack of understanding of the applications of both Saiba operators and Simak BMN operators and the lack of optimal courses and outreach carried out to support the process of preparing the Financial Report of the Indonesian Navy Organizational Unit

Suggestions from the authors in this study which are applied in the Theory of Constraint (TOC) developed (Hansen & Mowen, 2007) are focused on five steps, namely: 1. Identifying constraints 2. Exploring constraints 3. Designing an Efficient System 4. Elevation of the Constraint 5. Repeat Process. This theoretical concept can be applied to improve the performance of agencies facing limited resources. TOC By applying the concept of constraints, it is hoped that the obstacles/constraints that affect the course of the process of preparing the Financial Statements at the U.O. The Indonesian Navy can be resolved and get the right solution to solve and reduce the problems that occur every year. After implementing the concept of constraints, it is expected to improve organizational performance even better by optimizing resources, both human resources and facilities and infrastructure to support the process of preparing financial reports in the Indonesian Navy's organizational units.

Keywords: Theory of Constraints, Financial Statements, Simak BMN.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PERMASALAHAN PENELITIAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Rumusan Masalah	11
1.4. Tujuan Penelitian.....	12
1.5. Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1 Dari aspek teoritis	12
1.5.2 Dari aspek praktisi	13
BAB II.....	14
TIJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Tinjauan Teori	19
BAB III.....	56
METODOLOGI PENELITIAN	56
3.1. Metode Penelitian	56
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	57
1. Sumber Data	57
2. Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.3. Teknik Analisis Data	60
3.4. Instrumen Penelitian	62
BAB IV	64
HASIL PENELITIAN.....	64

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64	
4.2 Identifikasi Kendala dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan		69
4.3. Penerapan Lima Langkah Theory of Constraint.....	77	
1. Identifikasi Kendala.....	77	
2. Explor kendala	85	
3. Rancang <i>System</i> yang Efisien	86	
4. Elevasi constraint.....	87	
5. Ulangi Proses	87	
4.4. Mengatasi Kendala- Kendala berdasarkan hasil analisis.....	87	
BAB V	89	
SIMPULAN DAN SARAN	89	
5.1 Simpulan.....	89	
5.2. Saran	90	
DAFTAR PUSTAKA	92	
LAMPIRAN	97	
UNIT ORGANISASI TNI ANGKATAN LAUTNERACA	109	

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Opini BPK Kemhan	3
Tabel 1.2	Perbandingan Realisasi Belanja U.O. TNI AL.....	5
Tabel 1.3	<i>Simak BMN dibandingkan dengan Saiba.....</i>	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1	<i>Key Informan.....</i>	58

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perbandingan realisasi.....	6
Grafik 1.2	Jumlah Selisih TKTM dari tahun 2017 sampai dengan 2020.....	9



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Langkah TOC.....	53
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir	55
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Diskual.....	64
Gambar 4.2	Struktur Organisasi APK.....	66



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Panduan Wawancara.....	92
Lampiran Transkrip Wawancara.....	93
Lampiran Dokumentasi penelitian.....	94
Lampiran Bebas Pustaka.....	95
Lampiran Permohonan Penelitian.....	96
Lampiran Selesai Penelitian.....	97

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mereformasi bidang keuangan dengan merilis 3 paket undang-undang mengenai pengelolaan keuangan negara yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara hal yang sangat penting dalam pemerintahan dan merupakan jantung kehidupan suatu negara untuk membiayai pembangunannya, dimana pengalokasian dana pembangunan tertuang dalam Anggaran Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

Pembangunan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) setiap Pemerintah harus mengelola barang milik negara (BMN) secara profesional, efektif, dan mengutamakan aspek ekonomi untuk memastikan bahwa pengeluaran digunakan secara benar, tepat sasaran, dan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat besarnya belanja negara terkait dengan pengeluaran aset dalam anggaran setiap tahunnya menurut (Tulungen, 2014) dalam (Tutu, 2022).

Ruang lingkup dalam pengaturan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi landasan yang sah di bidang penyelenggaraan keuangan negara yang di dalamnya diarahkan mengenai spekulasi dan sumber-sumber daya yang terisolir yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Di dalamnya juga diatur ruang lingkup, asas umum, kewenangan, penyelenggaraan pendapatan dan belanja negara dan daerah, pengelolaan keuangan negara dan daerah, pengelolaan piutang dan utang negara dan daerah, pengelolaan investasi dan barang, pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian internal pemerintah, penyelesaian kerugian, dan pengelolaan keuangan negara. Sesuai kebutuhan

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengembangan, dan pengendalian merupakan komponen pengelolaan BMN. Sebagai perpanjangan dari siklus logistik, ruang lingkup pengelolaan BMN mencakup siklus logistik yang lebih mendalam. Pemerintah sangat bergantung pada manajemen aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai pemerintah sebagai hasil dari peristiwa investasi sebelumnya. Sumber daya tersebut diharapkan dapat digunakan se-efektif mungkin oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan pengelolaan aset yang tertata dengan baik sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan keuangannya. Namun, jika aset tersebut tidak dikelola dengan baik, justru akan menjadi biaya kepada pemerintah karena mereka perlu dipelihara atau membayar untuk pemeliharaan, dan nilainya juga akan menurun seiring waktu dalam Anggraeni (2018). Menurut Mardiasmo (2002) dalam Anggraeni (2018) tiga prinsip dasar pengelolaan aset negara. Pengelolaan asset yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta pengawasan (*monitoring*).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Negara, tanggung jawab harus dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana diperlukan. manajemen dan tanggung jawab tunduk pada standar audit yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dibawah ini peneliti gambarkan opini BPK yang telah dicapai oleh Kementerian Pertahanan sejak tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 dengan nomor 26b/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021.

Tabel. 1.1 Rician Opini atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	022	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	023	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK RI tahun 2021

Tabel diatas menggambarkan bahwa laporan pengelolaan keuangan di bawah Kementrian Pertahanan mencapai opini BPK yang tertinggi yaitu WTP sejak tahun anggaran 2018 hingga 2020 namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan keuangan di kementrian pertahanan khususnya unit organisasi TNI AL seperti kurangnya memahami aturan hibah yang harusnya dilaporkan dalam pada penyusunan laporan keuangan eselon 1 saat rekonsiliasi yang rutin diadakan per triwulan dan semester setiap tahunnya, kurangnya memahami program aplikasi yang

tengah dilaksanakan baik operator SAIBA maupun operator SIMAK BMN sehingga setiap tahunnya selalu terjadi kesalahan yang sama selain itu ada beberapa operator SIMAK BMN bukan personel yang khusus melaksanakan penginputan laporan pengelolaan barang ke dalam aplikasi SIMAK BMN hanya tugas tambahan karena kekurangan personel dalam satker tersebut.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut harus memiliki Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista) yang memadai sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melaksanakan tugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut sebaiknya melaksanakan pemberdayaan wilayah laut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Pasal 9 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa TNI AL bertugas untuk mencapai tujuan tersebut.

Tugas dan tantangan TNI AL kedepan akibat dari dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional dari waktu ke waktu semakin kompleks. Terutama di era kepemimpinan nasional saat ini untuk dapat mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia menuntut kehadiran serta kemampuan TNI AL untuk menjaga kedaulatan di perairan yuridiksi Nasional. Disisi lain, kondisi alutsista yang di miliki oleh TNI AL saat ini jauh dari yang diharapkan, sedangkan kemampuan anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah belum dapat memenuhi postur ideal yang telah direncanakan. Namun demikian dengan terbatasnya ketersediaan anggaran TNI AL, tetap diupayakan alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan alutsista setiap tahunnya guna tetap menjaga dan mempertahankan kemampuannya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AL.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, setiap akhir tahun anggaran Laporan Keuangan akan diperiksa oleh lembaga pemeriksa yang telah ditunjuk pemerintah yaitu BPK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan

yang disajikan dalam laporan keuangan, dimana TNI AL yang merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 mendapat pendapat opini WTP dari BPK RI opini ini adalah opini tertinggi yang diberikan oleh BPK RI, dengan hal ini diupayakan untuk mempertahankan pencapaian opini WTP dari BPK RI. Meskipun laporan keuangan TNI AL sudah mendapatkan opini WTP dari BPK,

Sebagai instansi pemerintah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang merupakan bagian dari Unit Organisasi Kementerian Pertahanan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyusun Laporan Keuangan Anggaran/Barang yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dibawah ini perbandingan anggaran dengan realisasi yang dikelola oleh Unit Organisasi TNI AL dengan anggaran yang masuk dalam kategori sed

Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi Jenis Belanja TNI AL Tahun 2017 - 2020

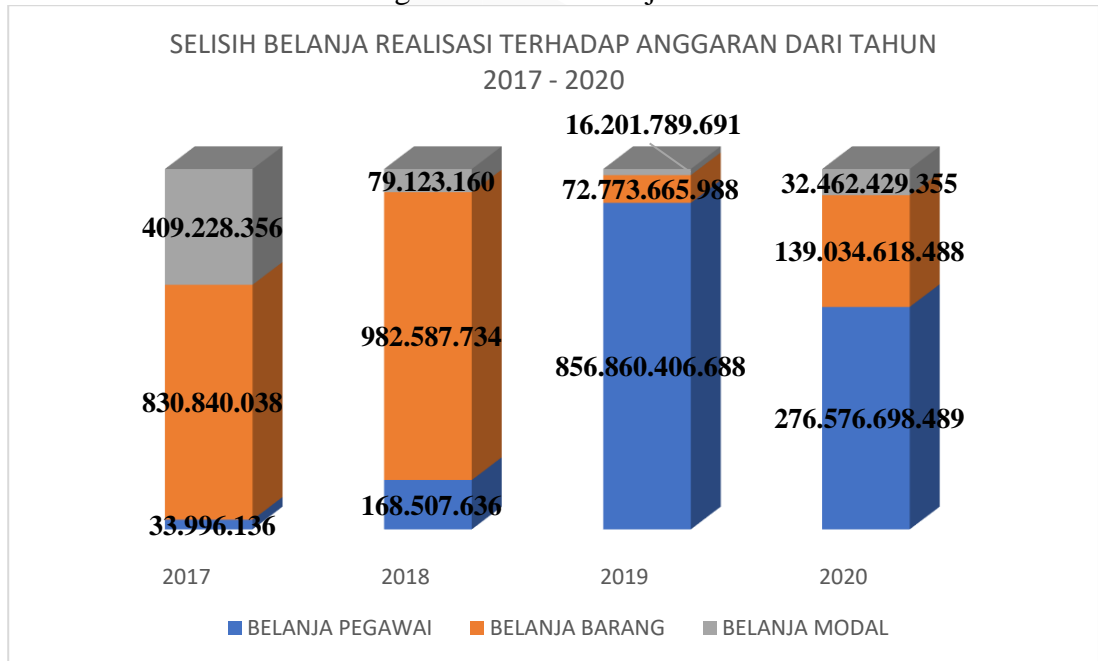
JENIS BELANJA	2017	2018	2019	2020
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
BEL. PEG	53.404.772.864	61.881.841.364	7.945.620.169.312	7.543.634.202.511
BEL. BRG	8.581.581.566.962	5.186.140.282.266	7.894.863.436.012	8.651.788.836.512
BEL. MDL	5.182.522.402.644	3.281.614.596.840	3.638.783.708.309	3.586.997.989.645

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran TNI AL

Dibawah ini peneliti gambarkan dalam bentuk grafik dari table diatas, dimana anggaran belanja yang besar yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan berupa menyusun laporan tentunya diperlukan pengelola keuangan yang telah mampu melakukan tugasnya secara optimal agar menghasilkan suatu laporan yang berkualitas serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan saat merencanakan sasaran yang dituju. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sumber daya yang mumpuni baik itu aturan yang berlaku sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia yang melaksanakan secara langsung dengan bantuan system baik itu data yang harus diolah hingga menghasilkan

informasi dengan bantuan aplikasi yang dapat mengaplikasikan gambaran dan posisi dimana dana di realisasikan sesuai dengan anggaran yang ditentukan awal rencana.

Grafik 1.1 Perbandingan Realisasi Belanja dari Tahun 2017-2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran TNI AL

Dari angka diatas dapat dilihat besarnya dana yang harus dikelola dan di pertanggung jawabkan U.O. TNI Angkatan Laut selain manajemen yang baik yang dipengaruhi pucuk pimpinan dan tidak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokoknya,

Dilingkungan Kementerian Pertahanan dan khususnya Unit Organisasi TNI AL dasar pengelolaan keuangan negara dengan dasar PMK Nomor 143 Tahun 2018 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia, selain itu PMK nomor 222 Tahun 2016 sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/Lembaga, dan pengelolaan barang milik negara menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

TNI Angkatan Laut dalam renstra 2010-2035 menyatakan ingin "mencapai sebagai Poros Maritim Dunia" guna mendukung visi pemerintah. Untuk itu, TNI Angkatan Laut perlu memiliki alutsista yang memadai sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, termasuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah laut serta penguatan matra laut. TNI AL bertugas dengan melaksanakan tugas maritim di bidang pertahanan, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung politik luar negeri pemerintah kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. mencapai tata kelola yang baik (*good governance*).

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menurut Pasal 9 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Angkatan Laut memiliki tugas pokok menjaga keamanan bangsa dan negara Indonesia di wilayah laut dan menjaga kedaulatan bangsa perbatasan laut dengan negara-negara tetangga. Tencantum dalam UUD 1945 bangsa Indonesia ikut serta dalam perdamaian dunia dengan cara menurunkan TNI di negara-negara berkonflik di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta ikut Latihan dengan Angkatan Laut negara sahabat dalam rangka hubungan diplomatik mewaliki pemerintah Indonesia.

Dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas TNI AL melakukan kegiatan yang berhubungan keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia baik itu kapal-kapal KRI dan persenjataan lainnya, pemeliharaan, pengadaan dan persediaan serta tidak kalah pentingnya kesejahteraan personel. Selain melaksanakan tugas pokok, TNI AL wajib Menyusun Laporan Keuangan sebagai tanggung jawab moral instansi mencapai *good governance*.

Laporan Keuangan unit organisasi TNI AL di susun oleh Subdinas Akuntansi Pelaporan Keuangan Dinas Keuangan Angkatan Laut, dimana Subdinas ini membina satu Kantor Pusat dan 138 Kantor Daerah yang dioperasikan oleh operator SAIBA untuk melaporkan pengelolaan keuangannya agar dapat disusun menjadi Laporan Realisasi Anggaran Lembaga atau Kementerian. Selain itu juga berkoordinasi dengan pengelolaan barang atau pengelola BMN, sedangkan pengelola BMN tersebar sebanyak 105 Satker Logistik dan juga berkoordinasi dengan bagian perencanaan keuangan. Begitu banyaknya yang di bina dengan tersebar letaknya di seluruh wilayah Negara Indonesia terjadi banyak kendala seperti terjadi antara operator Anggaran dengan Operator BMN.

Operator SAIBA dan operator SIMAK BMN peranannya sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara bila kurang menguasai aplikasinya, dan tidak memahami aturan yang berlaku serta kelalaian penginputan berakibat pada informasi kurang valid yang diberikan pada pemimpin dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan BMN. Seorang operator Simak BMN harus dapat memberikan laporan asset yang dikelola TNI AL baik itu yang merupakan masih dalam pemeliharaan dan pengadaan untuk kesinambungan informasi asset kepada pimpinan dalam hal pengelolaan BMN, sedang operator SAIBA memberikan informasi seberapa besar anggaran yang dimiliki untuk menjalankan organisasi sehingga kegiatan tetap dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Dibawah ini dapat dilihat perbandingan selisih asset dengan anggaran yang dikelola oleh unit organisasi TNI AL.

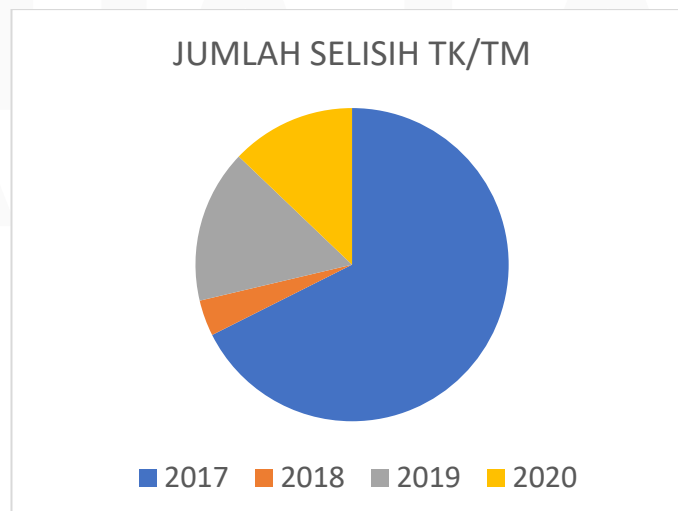
Tabel 1.3 SIMAK BMN dibandingkan dengan SAIBA.

TAHUN	JUMLAH SELISIH TK/TM
2017	14.420.826.144.862
2018	793.127.500.907
2019	3.376.692.593.196
2020	2.745.744.719.434

Sumber: Simak BMN TNI AL

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, peneliti memberikan gambaran dalam bentuk grafik (lihat Grafik 1.2), perbandingan antara selisih Transaksi Keluar (TK) dengan Transaksi Masuk (TM) terjadi karena berbagai hal akibat dari kurangnya memahami program aplikasi SIMAK BMN sehingga saat mengerjakan tugasnya tidak valid, kesalahan *input* akun sehingga saat rekonsiliasi tidak sinkron dengan laporan anggaran selain itu selisih TK/TM disebabkan karena tidak terdaftar akibat dari pihak operator dari sakter TK sudah menginput sedang dari sakter TM belum menginputnya sehingga saat *e-recon* terjadi selisih, dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini.

Grafik 1.2 Jumlah selisih TK/TM



Sumber: Simak BMN TNI AL

Dalam pengelolaan suatu organisasi perjalanan menuju tujuan yang telah ditetapkan dapat ditemui suatu kendala-kendala, dalam hal ini baik hambatan dan permasalahan yang dihadapi perlu dicari solusi pemecahannya. Maka dari itu dapat di lihat tabel selisih antara realisasi anggaran asset dengan laporan pengelolaan BMN diatas begitu besar dan menjadi masalah tiap tahunnya sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan penyusunan laporan keuangan unit TNI AL maka perlu dicari solusinya.

Setiap organisasi pasti memiliki suatu hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan, untuk menghapus kendala tersebut perlu adanya suatu pengelolaan kendala. Ada teori yang dapat memecahkan suatu kendala dalam suatu organisasi teori itu dikenal sebagai teori “*Theory of Constraint* (TOC)” yang pertama kali diperkenalkan oleh Eliyahu M. Goldratt pada tahun 1984 yang merupakan teori kendala yang mulanya berkembang dalam akuntansi manajemen swasta, namun konsep teori ini dapat diterapkan untuk memperbaiki kinerja instansi yang menghadapi sumberdaya terbatas. TOC yang dikembangkan (Hansen & Mowen, 2007) dalam (Ali tafrizi Biswan dan Darhasani, 2018) difokuskan pada lima langkah yaitu:

1. Identifikasi kendala
2. Eksplor kendala
3. Rancang Sistem yang Efisien
4. *Elevasi constraint* (bila langkah 2 dan 3 gagal)
5. Ulangi proses dari awal.

Dengan menerapkan konsep kendala ini diharapkan hambatan/kendala yang mempengaruhi jalannya proses penyusunan Laporan Keuangan pada U.O. TNI Angkatan Laut dapat memecahkan semua masalah yang dihadapi dan mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan dan mengurangi masalah yang terjadi tiap tahunnya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi sementara penelitian ini didapat beberapa permasalahan, Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah telah terjadi kendala-kendala selama penyusunan laporan keuangan pada:

1. Saat dilaksanakan rekonsiliasi ditemukan adanya selisih antara satker Transaksi Keluar dengan satker Transaksi Masuk yang begitu besar jumlahnya dan hal ini berulang tiap tahunnya.
2. Realisasi pagu minus dibandingkan dengan pagu anggaran.
3. Operator Saiba ataupun operator Simak BMN kurang menguasai aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan
4. Operator Simak BMN kebanyakan penunjukan tugasnya merupakan tugas tambahan.
5. Walaupun demikian kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan jurnal penyelesai saat laporan keuangan di buat, dengan permasalahan ini berimbas terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertahanan dan khususnya unit organisasi TNI Angkatan Laut.
6. Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TK/TM) yang tinggi dan mengakibatkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan berulang setiap tahunnya pada permasalahan yang sama.

1.3. Rumusan Masalah

Dengan uraian pada latar belakang peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada proses penyusunan Laporan Keuangan disubdis Akuntansi Pelaporan Keuangan Dinas Keuangan Angkatan Laut.

1. Bagaimana faktor-faktor kendala mempengaruhi proses penyusunan Laporan Keuangan?
2. Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengalisis faktor-faktor kendala dapat mempengaruhi proses penyusunan Laporan Keuangan
2. Menemukan solusi pemecahannya agar meminimalkan permasalahan secara berulang dalam proses penyusunan Laporan Keuangan U.O. TNI Angkatan Laut.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Dari aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal baru dalam literatur mengenai permasalahan dalam masa penyusunan laporan keuangan. Di samping itu sebagai dukungan penulis terhadap pengembangan ilmu manajemen keuangan negara dan pelaporan keuangan khususnya sektor pemerintah pusat.

1. Referensi akademik bagi peneliti selanjutnya karena hambatan dalam organisasi selalu akan ada dengan berkembangnya suatu organisasi dan kemajuan teknologi.
2. Diharapkan penelitian yang peneliti lakukan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam memecahkan persoalan yang dihadapi selama masa penyusunan laporan keuangan agar tepat waktu sehingga menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih berkualitas dan mampu memberikan informasi bermanfaat bagi pimpinan dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk kepentingan kemajuan dan perkembangan TNI Angkatan Laut.

1.5.2 Dari aspek praktisi

Merupakan sumbangan pemikiran penulis bagi Unit Organisasi Angkatan Laut dalam mencari untuk melihat sejauh mana faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya permasalahan pada pengelolaan Barang Milik Negara kementerian negara/lembaga sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan terkait peningkatan penyusunan laporan keuangan, baik kebijakan yang sudah ada atau yang akan diambil. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran bagi kementerian/lembaga lain yang memiliki karakteristik serupa dalam hal peningkatan penyusunan laporan keuangan negara.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A